



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG  
PEREKONOMIAN**

**EITI Indonesia**

# **Laporan EITI Tahap II : Pemaparan, Tinjauan & Rekomendasi**

**Emy Perdanahari Ph.D**

**Ketua Sekretariat Tim Transparansi Industri Ekstraktif**

**Disampaikan dalam acara Seminar dan Lokakarya**

**“Pelaksanaan Transparansi dan Upaya Perbaikan Tata Kelola  
Industri Ekstraktif di Indonesia”**

**Bandung, 12 November 2014**

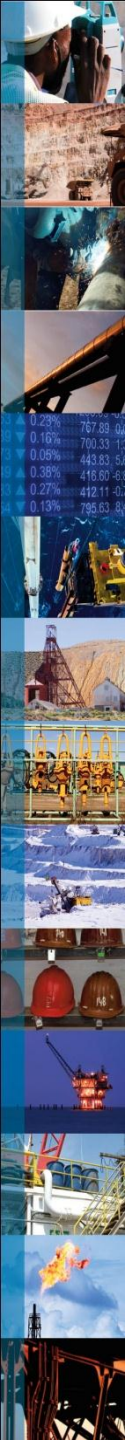
<http://eiti.ekon.go.id>

- 1) Gambaran pelaksanaan EITI di Indonesia**
- 2) Laporan EITI Tahap II**
  - 1) Laporan Sub Sektor Migas**
  - 2) Laporan Sub Sektor Minerba**
- 3) Isu dan Rekomendasi**

# Extractive Industry Transparency Initiatives (EITI) Indonesia



- ✓ Standar internasional mengenai transparansi penerimaan negara yang bersumber dari industri ekstraktif (migas dan pertambangan)
- ✓ Prinsip dasar dari standar ini adalah rekonsiliasi laporan dari perusahaan industri ekstraktif dan pemerintah, hasilnya terbuka sebagai informasi publik.



- ✓ 48 negara anggota EITI, 30 negara *compliant*, 17 negara *candidate* (USA dan UK bergabung tahun 2014), 1 negara *suspended*.
- ✓ Indonesia menjadi *compliant country* pada bulan Oktober 2014
- ✓ Indonesia negara pertama di ASEAN yang menerapkan EITI diikuti oleh Filipina dan Myanmar



# Mekanisme Rekonsiliasi Pelaporan EITI

**PERUSAHAAN MENGUMUMKAN BERAPA YANG MEREKA BAYAR  
DAN PEMERINTAH MENGUMUMKAN BERAPA YANG MEREKA TERIMA DALAM LAPORAN EITI.**



## PERUSAHAAN

memperlihatkan dan  
membuktikan pembayaran  
mereka



## EITI REPORTS

menunjukkan dimana  
pembayaran pajak dan  
royalti diverifikasi dan  
direkonsiliasi secara independen



## PEMERINTAH

memperlihatkan dan  
membuktikan penerimaan  
mereka

# Pelaksanaan EITI di Indonesia



- Dasar hukum: Perpres No. 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif.
- Partisipasi tim pelaksana dalam menyusun laporan EITI Indonesia ( jumlah rapat )
- Penyusunan laporan oleh Rekonsiliator Independen yang diawasi oleh Tim Pelaksana
- Sosialisasi untuk menyebarluaskan informasi



# Rapat Tim Pelaksana



- Merupakan kegiatan kunci dalam memantau pelaksanaan EITI di Indonesia
- Dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana dan dihadiri oleh anggota Tim Pelaksana atau yang mewakili
- Pengambilan keputusan dilakukan secara konsensus atau musyawarah mufakat
- Dilakukan sekitar 3 bulan sekali, bertempat di Kantor Kemenko Perekonomian

# Laporan EITI Indonesia

- Laporan I (tahun kalender 2009) terbit dan dipublikasikan pada bulan April 2013.
- Laporan II (tahun kalender 2010 dan 2011) terbit pada bulan April 2014 (untuk sub-sektor migas) dan bulan Juni 2014 (untuk sub-sektor mineral dan batubara).





# Laporan EITI Tahap II

## Sub Sektor Minyak dan Gas

# Aliran yang Dilaporkan Sisi Pemerintah

## Minyak dan Gas

### Aliran Penerimaan

**Ditjen Anggaran**

- Corporate & Dividend Tax (USD)
- Production Bonus (USD)
- Over/(Under) Lifting Oil&Gas (USD)

**SKK Migas**

- Total Lifting Oil (Barrels) & Gas (MSCF)
- GOI Lifting Oil (Barrels) & Gas (MSCF)
- DMO (Barrels)
- DMO Fee (USD)
- Over/(Under) Lifting Oil&Gas (USD)
- Signature Bonus (USD)

**Ditjen Migas**

**VS**

Operator	Partner


--	--

# Aliran yang Dilaporkan Sisi Perusahaan Pelapor

## Minyak dan Gas

### Aliran Penerimaan:

**Operator**

- Corporate & Dividend Tax (USD)
- Production Bonus (USD)
- Over/(Under) Lifting Oil&Gas (USD)
- Total Lifting Oil (Barrels)
- Total Lifting Gas (MSCF)
- GOI Lifting Oil (Barrels)
- GOI Lifting Gas (MSCF)
- DMO (Barrels)
- DMO Fee (USD)
- Signature Bonus (USD)

**Partner**

- Corporate & Dividend Tax (USD)

Ditjen  
Anggaran

SKK  
Migas

Ditjen  
Migas

**VS**


--	--	--



# Status Rekonsiliasi

## Minyak dan Gas

### Pendapatan Pajak

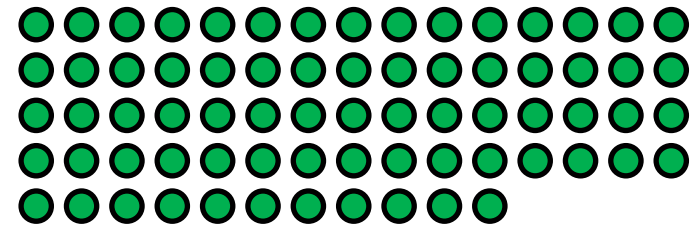
- Ditjen Anggaran

### Bukan Pajak

- SKK Migas
- Ditjen Anggaran
- Ditjen Migas

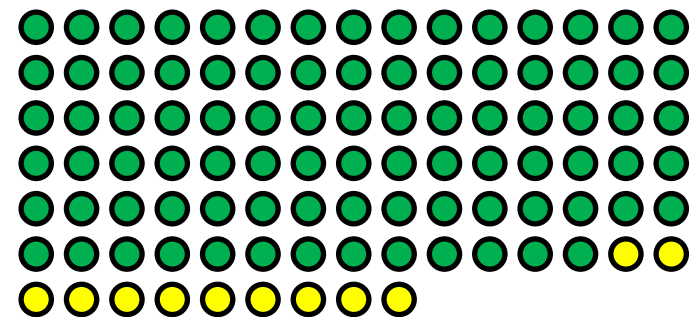
VS

### Operator



71 melaporkan

### Non-Operator/Partner



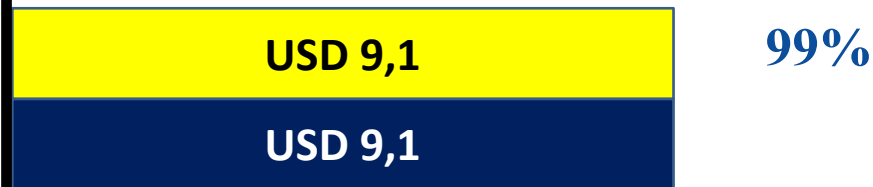
88 melaporkan

11 tidak melaporkan

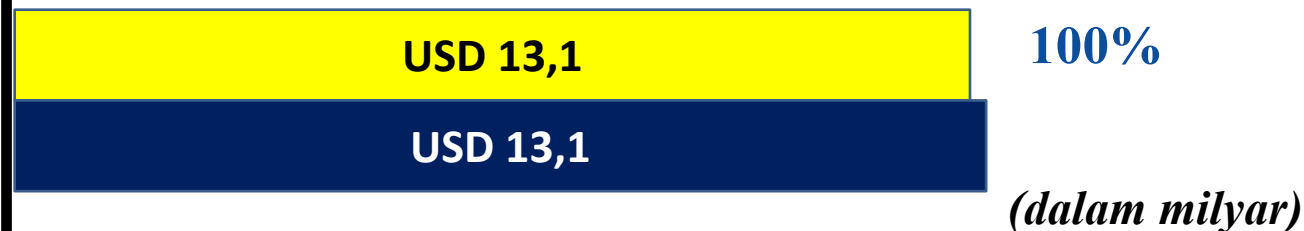
# Hasil Proses Rekonsiliasi

## Minyak dan Gas

### Pajak - Corporate & Dividen Tax



### Bukan Pajak - Prod. Bonus, Signature Bonus, DMO Fee, Over Under Lifting Oil & Gas



(dalam milyar)

- Perusahaan Pelapor
- Instansi Pemerintah

# Laporan EITI Tahap II

## Sub Sektor Mineral dan Batubara



# Aliran yang Dilaporkan Sisi Pemerintah

## Mineral dan Batubara

### Aliran Penerimaan

Coal Minerals

Ditjen  
Minerba



- Royalti
- Penjualan Hasil Tambang **PKP2B**


Ditjen  
Pajak



- PPh Badan

VS

--	--

Ditjen  
Anggaran



- Dividen

--	--

# Aliran yang Dilaporkan Sisi Perusahaan Pelapor

## Mineral dan Batubara

### Aliran Penerimaan

#### Batubara

- PKP2B
- IUP BB

- Royalti
- Penjualan Hasil Tambang - **PKP2B**
- PPh Badan
- Dividen

#### Mineral

- KK Mineral
- IUP Mineral

- Royalti
- PPh Badan
- Dividen

VS

Ditjen DJ DJ  
Minerba Pajak Angg



# Status Rekonsiliasi

## Mineral dan Batubara

### Pendapatan Pajak

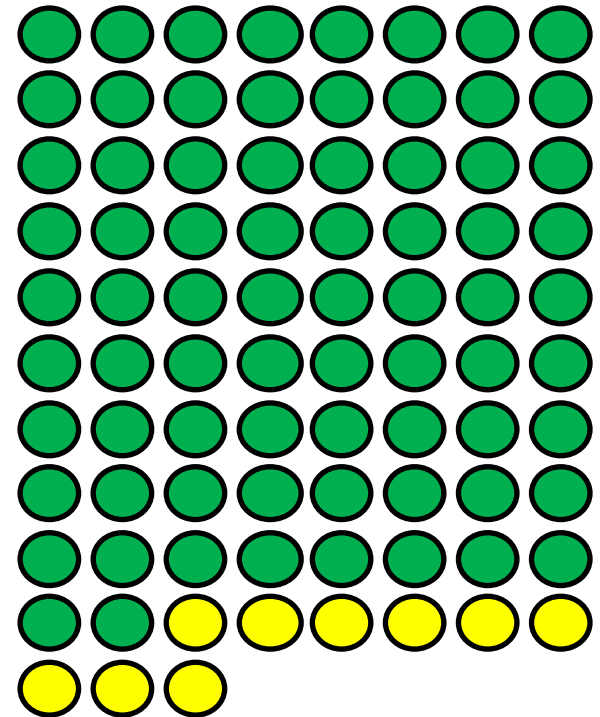
- Ditjen Pajak

### Bukan Pajak

- Ditjen Minerba
- Ditjen Anggaran

VS

### Perusahaan Pelapor



**74** melaporkan

**9** tidak melaporkan



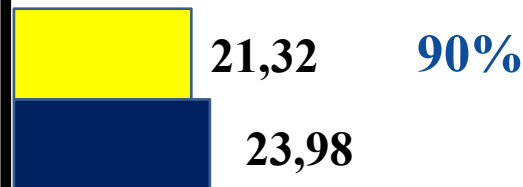
# Hasil Proses Rekonsiliasi

## Mineral dan Batubara

### Pajak – PPh Badan

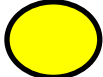



### Bukan Pajak- Royalti dan PHT



*(dalam triliun Rp)*

2 4 6 8 10 12 14

-  Perusahaan Pelapor
-  Pemerintah

# Tinjauan dan Rekomendasi

# Isu dan Rekomendasi Sub Sektor Migas (1)

## Tinjauan

1. Laporan Rekonsiliasi untuk tahun 2010-2011 menunjukkan adanya selisih USD 34,82juta yang disebabkan karena over lifting akibat cost recovery yang belum selesai hingga 2014.
2. Terdapat perubahan data pembayar PPh Migas jika terjadi perubahan kepemilikan Participating Interest.
3. Terdapat sejumlah pemilik Participating Interest yang merupakan perusahaan berlokasi di luar Indonesia yang tidak terdaftar NPWP di Indonesia.

## Rekomendasi

- Perlu melakukan tinjauan dan perbaikan untuk mekanisme penyelesaian atas perbedaan hitung cost recovery dan over lifting.
- Ditjen Pajak telah memiliki KPPN Migas untuk memeriksa setoran PPh Migas. Perhitungan pajak oleh Dit. PNBP dikembalikan kepada Ditjen Pajak untuk memeriksa kelayakan setoran pajak dan menerbitkan STP atas kekurangan pajak kontraktor dan mitranya.
- Pembaruan data pemilik PI dapat dikoordinasikan antara SKK Migas, Ditjen Pajak, dan Ditjen Anggaran secara reguler.

# Isu dan Rekomendasi Sub Sektor Migas (2)

## Tinjauan

4. Sudah mulai dikembangkan Sistem Operasi Terpadu real time dan online dari titik custody transfer langsung kepada basis data pemerintah

## Rekomendasi

Implementasi SOT lifting diberlakukan untuk semua KKKS. SOT dimonitor oleh Ditjen migas dan dapat diakses oleh publik.



# Isu dan Rekomendasi Sub Sektor Minerba

## Tinjauan

Administrator pemungut royalti belum memiliki basis data untuk memantau perusahaan yang melapor secara benar, tidak benar, atau tidak melapor.

Mekanisme memeriksa jumlah setoran royalti lemah masih lemah karena data produksi belum terintegrasi.

Informasi pajak harus mematuhi UU Pajak khususnya tentang kerahasiaan wajib pajak.

## Rekomendasi

Perlu dibangun sistem pencatatan produksi elektronik terintegrasi.

Setiap perusahaan diwajibkan untuk menyetor PNBP melalui sistem Modul Penerimaan Negara.

Sistem monitoring dibangun antara sistem keuangan dengan sistem produksi.

Sektor pertambangan adalah sektor khusus yang mengekstraksi kekayaan bumi Indonesia, untuk itu perlu dukungan semua pihak untuk transparansi pajak khusus minerba.



 @eiti\_ID